

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Konsekuensi dari amanat tersebut adalah Pemerintah berkewajiban memberikan layanan pendidikan dan membiayai pelaksanaan program pendidikan, bagi peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Ada beragam sumber dana yang dimiliki oleh suatu sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang professional dan jujur. Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang

daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan keuangannya pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, bahkan mungkin sangat besar, tentu saja pengelolaan keuangannya cenderung menjadi lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya.

Salah satu sumber keuangan sekolah yang saat ini digulirkan oleh pemerintah khususnya untuk Lembaga Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar (SD)/Sekolah dasar Luar Biasa (SDLB)) dan Menengah (Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah menengah Luar Biasa (SMPLB)) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tentu saja bagi sekolah-sekolah tertentu selain dana BOS ada sumber keuangan lain selain dari pemerintah diantaranya dana dari orang tua siswa, dana dari masyarakat, dana dari sumbangan alumni, dana dari peserta sebuah kegiatan yang diadakan sekolah, dana dari kegiatan wirausaha sekolah dan lain-lain.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah agar rakyat mendapat peningkatan akses pendidikan yang lebih berkualitas dan menjangkau pelayanan pendidikan adalah dengan cara mengadakan suatu program pemberian dana terhadap pendidikan dasar sembilan tahun. Program pemberian dana tersebut adalah Bantuan Operasional Sekolah atau yang lebih dikenal dengan nama (BOS) dan Program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah suatu kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi kebijakan dalam perluasan dan

pemerataan akses pendidikan, khususnya dalam mendukung program wajib belajar sembilan tahun. BOS merupakan implementasi dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya serta wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Sejak tahun 2015 peranan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) amat strategis dalam percepatan pencapaian target program wajib belajar sembilan tahun. Sebagai institusi pengguna langsung dana BOS, Lembaga Pendidikan Dasar (SD/ SDLB) dan Menengah (SMP/ SMPLB), khususnya sekolah-sekolah yang mendapatkan alokasi dana BOS, wajib mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan kegiatan di sekolahnya sesuai Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). Seluruh kegiatan belanja/pengadaan barang dan jasa harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu semua transaksi pembelanjaan dan atau pengadaan mesti dilampirkan sebagai bukti pelaporan /pertanggungjawaban. Pada pelaporan sistem keuangan sekarang ini dituntut untuk menggunakan sistem Akuntansi yang benar dan transparan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar program operasional sekolah (BOS) dan program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dapat tetap hidup dan mampu bersaing meningkatkan kualitas pendidikan adalah bagaimana sekolah atau perusahaan nirlaba tersebut dapat menjalankan

sistem informasi dengan tepat dan cepat. Sistem informasi yang tepat dan cepat dapat membantu kebijakan manajemen dalam merencanakan program dan menjalankan sistem informasi yang tepat dan cepat. Sistem informasi yang tepat dan cepat dapat membantu kebijakan manajemen dalam merencanakan program dan menjalankan kegiatan operasional sekolah sehingga dapat mencapai sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut.

Sistem informasi yang tepat itu sendiri dapat digolongkan ke dalam sistem yang lebih kecil. Menurut Amir (2015: 4); sistem informasi dibagi menjadi 7 subsistem yang meliputi: Sistem Pemrosesan Data Elektronik (EDP), Sistem Pemrosesan Data (PD), Sistem Informasi Manajemen (SIM), Sistem Penunjang Keputusan (DSS), Sistem Ahli (ES), Sistem Informasi Eksekutif (EIS) dan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Salah satu sistem informasi tersebut adalah informasi akuntansi yang dihasilkan dari sebuah sistem informasi akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengorganisir, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak internal dan eksternal. Dengan adanya Sistem Informasi Akuntansi diharapkan pihak manajemen dapat mengoptimalkan sumber daya sehingga kegiatan operasional sekolah tetap berjalan dengan baik serta memperoleh kualitas pendidikan yang maksimal.

Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu sistem mencatat, mengumpulkan, mengklasifikasikan data atau informasi yang dihasilkan dari transaksi perusahaan. Data atau informasi tersebut selanjutnya dianalisis,

didistribusikan, dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi atau perusahaan yang bergerak dalam bidang barang, jasa maupun manufaktur sangat memerlukan Sistem Informasi Akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan manajemen maupun berbagai pihak diluar perusahaan yang membutuhkannya. Selain itu, agar Sistem Informasi Akuntansi dapat beroperasi dengan efektif dan efisien, maka manajemen perlu membuat sistem pengendalian intern. Pengendalian intern dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi adanya kesalahan maupun penyimpangan yang terjadi dalam sistem informasi akuntansi, sehingga tujuan sistem pengendalian intern untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dapat tercapai.

Informasi akuntansi memiliki peranan yang sangat penting untuk meraih keberhasilan usaha. Informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan dapat menjadi modal awal bagi sekolah untuk mengambil berbagai keputusan dalam pengelolaan organisasi, antara lain keputusan pengembangan sekolah, penentuan biaya pendidikan, dan lain-lain. Dalam hubungannya dengan pemerintah dan orang tua siswa, penyediaan informasi akuntansi juga diperlukan.

Didalam konsep kesatuan usaha (*economic entity*), organisasi dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya. Atau dengan kata lain perusahaan dianggap sebagai “unit

akuntansi” yang terpisah dari pemiliknya atau dari kesatuan usaha yang lain. Untuk tujuan akuntansi, perusahaan dipisahkan dari pemegang saham atas pemilik. Dengan anggapan seperti ini maka transaksi–transaksi perusahaan dipisahkan dari transaksi–transaksi pemilik dan oleh karenanya maka semua pencatatan dan laporan dibuat untuk perusahaan tadi ( Baridwan, 2014: 8).

Untuk mendapatkan gambaran tentang sistem informasi akuntansi, maka diperlukan sebuah analisis Sistem Informasi Akuntansi dan pengendalian intern pada sebuah sekolah. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai hingga sejauhmana analisis Sistem Informasi Akuntansi atas prosedur penerimaan dan pengeluaran dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program bantuan operasional pendidikan (BOP) terutama dalam pembiayaan gaji guru dan karyawan pada MTs. Miftahul Ulum Pendem terhadap teori relevan yang melandasinya.

Selain itu, evaluasi ini diarahkan pada pelaksanaan pengendalian internal sekolah atau perusahaan nirlaba tersebut terhadap prosedur, maksudnya adalah apakah pelaksanaan pengendalian internalnya efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dengan dilakukannya evaluasi ini diharapkan dapat memberikan jaminan yang memadai terhadap keamanan sekolah atau perusahaan nirlaba, keandalan serta keakuratan informasi yang dihasilkan. Adapun kriteria dari pengendalian internal, yaitu: (a) Keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) keputusan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (IAI, 2011:319).

Dengan menetapkan serta menerapkan pengendalian internal secara baik dan benar pada suatu perusahaan, maka sekolah atau perusahaan nirlaba tersebut akan lebih mudah dalam mencapai tujuan dan dapat meminimalkan resiko. Menurut Wilkison seperti yang telah dikutip oleh Apriani (2014) mengungkapkan bahwa: “Jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan akan tercapai, resiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas.”

Tanpa adanya pengendalian internal, kondisi yang membawa dampak negatif bagi sekolah atau perusahaan nirlaba mungkin akan terjadi, seperti kesalahan pengambilan keputusan, inefisiensi biaya, kehilangan aset, terhentinya kegiatan usaha maupun terkena sanksi. Sebagai hasilnya dengan diterapkannya pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi, maka sistem informasi akuntansi akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas (tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap), dapat di audit (*Auditable*) dan juga dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi pihak manajemen sekolah.

Alasan dipilihnya Mts. Miftahul Ulum Pendem karena di kecamatan Kembang Jepara, pembuat laporan dana Bos tercepat untuk dinas P dan K adalah SMP Negeri 2 Dudak Awu, sementara untuk pelaporan Kemenang Mts. Miftahul Ulum Pendem adalah yang tercepat. Selain itu Mts. Miftahul Ulum Pendem memiliki siswa yang selalu naik jumlahnya, sehingga dana BOS yang diterima selalu mengalami peningkatan jumlahnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian: Pembiayaan gaji guru dan karyawan Mts. Miftahul Ulum Pendem dari dana BOS.

## **1.2. Ruang Lingkup Masalah**

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Perencanaan dan penatausahaan dana BOS di MTs. Miftahul Ulum Pendem.
2. Pertanggungjawaban dana BOS di MTs. Miftahul Ulum Pendem tahun 2017-2018.

## **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana BOS di MTs. Miftahul Ulum Pendem?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana BOS di MTs. Miftahul Ulum Pendem.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:



1. Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis mengenai prosedur perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana BOS di MTs. Miftahul Ulum Pendem dalam pembiayaan gaji guru dan karyawan dan sebagai salah satu proses untuk semakin meningkatkan keterampilan.
2. Bagi MTs. Miftahul Ulum Pendem, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait.
3. Bagi pihak lain, melalui hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

#### 1.6. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran mengenai isi dari skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan mengenai tinjauan pustaka tentang konsep prosedur perencanaan, penatausahaan dan

pertanggungjawaban dana BOS, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Pemikiran.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian berupa jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisa data.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas uraian deskripsi obyek penelitian, struktur organisasi, penyajian data dan pembahasan tentang permasalahan.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dan saran penelitian yang dilakukan.

